



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2025



ANUGERAH
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024



**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2025**

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati

Wujudkan BBPP Ketindan Sebagai Wilayah Zona Integritas



@BBPPKetindanLerning



@bbppketindan



<https://bbppketindan.bpsdmp.pertanian.go.id/>



@bbppketindan27



@ketindan.bbpi



@ketindanbbpp



**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) KETINDAN TAHUN 2025**



**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pembangunan Zona Integritas BBPP Ketindan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen BBPP Ketindan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta sebagai upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas merupakan proses perubahan yang menyeluruh, mencakup penguatan sistem, budaya kerja, serta perilaku aparatur. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan, antara lain perbedaan dan keterbatasan pemahaman terhadap beberapa aspek Pembangunan Zona Integritas. Oleh karena itu, laporan ini disusun untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan di BBPP Ketindan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, sekaligus mendorong terwujudnya komitmen bersama seluruh pegawai BBPP Ketindan dalam mendukung pencapaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di masa yang akan datang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di BBPP Ketindan.

Malang, 15 Desember 2025

Kepala Balai Besar Pelatihan
Pertanian Ketindan,



Nurif Qomariyah, S.Sos., M.Si.
NIP 196910232002122001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	2
BAB II HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	3
A. Hasil Pelaksanaan	3
I. Komponen Pengungkit	4
1. Manajemen Perubahan	4
2. Penataan Tatalaksana	7
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	9
4. Penguatan Akuntabilitas	13
5. Penguatan Pengawasan	14
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	17
II. Komponen Hasil	21
1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	21
2. Pelayanan Publik yang Prima	21
B. Kendala	21
BAB III PENUTUP	22
LAMPIRAN	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah langkah konkret pemerintah dalam mencegah dan memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah korupsi dengan strategi yang jelas, seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya pelaksanaan bersama dan bersinergi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan lainnya dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, pemerintah yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan public yang prima perlu melakukan pembangunan zona integritas pada unit kerja/ satuan kerja di instansi pemerintah, salah satunya yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan.

Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan mengacu pada enam area perubahan yang ditetapkan yaitu 1) Manajemen Perubahan, 2) Penataan Tatalaksana, 3) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, 4) Penguatan Akuntabilitas, 5) Penguatan Pengawasan dan 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Laporan pelaksanaan pembangunan zona integritas ini dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Tujuan laporan pelaksanaan pembangunan zona integritas ini adalah memberikan informasi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan.

1.3. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. Hasil Pelaksanaan

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dilakukan secara masif pada masing-masing area perubahan. Pelaksanaan rencana kerja dilakukan secara paralel oleh penanggung jawab area perubahan berdasarkan tim kerja pembangunan Zona Integritas. Berdasarkan hasil penilaian mandiri melalui Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan memperoleh nilai evaluasi **90.53** dengan rincian nilai per area sebagai berikut:

Tabel 1. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) BBPP Ketindan Tahun 2025

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%
A. PENGUNGKIT		60.00				
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	3.65	2.67	6.31	78.91%
2.	PENATAAN TATALAKSANA	7.00	3.22	2.59	5.81	82.98%
3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	4.65	4.25	8.90	88.98%
4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	5.00	5.00	10.00	100.00%
5.	PENGUATAN PENGAWASAN	18.00	6.90	7.50	14.40	96.02%
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	4.28	3.49	7.77	77.74%
TOTAL PENGUNGKIT					53.30	88.66%
B. HASIL		40.00				
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22.50			21.28	94.56%
a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survey Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	17.50			16.28	93.00%
b.	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00			5.00	100.00%
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17.50			16.06	91.75%
-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17.50			16.06	91.75%
TOTAL HASIL					37.33	93.33%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI					90.53	

Berikut hasil pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan:

I. KOMPONEN PENGUNGKIT

1. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan ini bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta (pola pikir) dan culture set (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan

kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Target yang ingin dicapai pada area Manajemen Perubahan adalah sebagai berikut :

- 1) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pada BBPP Ketindan yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- 2) Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 3) Terimplementasinya Core Value ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) di BBPP Ketindan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a. Penentuan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

Tim kerja telah disusun dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 18/Kpts/PW.410/I.14.1/01/2025 tentang Penetapan Tim Zona Integritas BBPP Ketindan Tahun 2025. Tim kerja disusun berdasarkan mekanisme yang jelas dan di bahas dalam rapat pembentukan tim yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2025.

Gambar 1. Rapat Penentuan Tim ZI BBPP Ketindan Tahun 2025



b. Rencana Pembangunan Zona Integritas

Dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas telah disusun dan ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2025. Pembangunan zona integritas juga telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media sosial penggunaan pin anti korupsi dan pelaksanaan kegiatan apel pagi yang dilakukan pada hari senin dan rabu.

Gambar 2. Rapat Pembahasan Rencana Kerja Pembangunan ZI BBPP Ketindan Tahun 2025



Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan pembangunan zona integritas, Kepala BBPP Ketindan bersama seluruh pegawai BBPP Ketindan telah melakukan penandatanganan pakta integritas untuk mendukung pembangunan zona integritas di lingkungan BBPP Ketindan.

Gambar 3. Pakta Integritas BBPP Ketindan

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

Dilakukan monitoring dan evaluasi pada enam area pembangunan zona integritas setiap triwulan guna memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jadwal dan rencana kerja pembangunan zona integritas.

Gambar 4. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI BBPP Ketindan



d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

BBPP Ketindan telah menerapkan nilai budaya kerja "BerAKHLAK". Implementasi nilai ASN BerAKHLAK di lingkungan BBPP Ketindan memiliki kekuatan untuk membangun budaya kerja yang positif dan sehat. Nilai-nilai tersebut membantu membangun kepercayaan, saling menghormati, dan mendorong integritas di antara Pimpinan dan Pegawai.

Gambar 5. Sosialisasi BerAKHLAK



Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan BBPP Ketindan. Adapun kegiatan pimpinan yang telah dilaksanakan sebagai berikut pelaksanaan Gerakan Sholat Berjamaah Tepat Waktu "Gema Tepat", Pencanaan Zona Hijau, Penanaman Padi bersama dalam rangka mendukung Swasembada Pangan, Penandatanganan Pakta Integritas, Pencanaan Pojok Literasi, Pembina Apel Pagi, dan Inisiator kegiatan Rapim On The Spot (ROTS).

Gambar 6. Rapim On The Spot (ROTS) BBPP Ketindan



Pemilihan agen perubahan di lingkungan BBPP Ketindan telah dilakukan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Nomor 1/Kpts/OT.240 I.14.1/02/2025 tentang Agen Perubahan Lingkup BBPP Ketindan Tahun 2025 atas nama Uli Mahendra Kurniawan, S.Kom., M.Kom.

Gambar 7. Kegiatan Agen Perubahan BBPP Ketindan



2. Penataan Tatalaksana

Penataan tata laksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Indikator dilakukannya penataan tata laksana ini adalah tersusunnya prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan utama, *e-office*, dan keterbukaan informasi publik. Target yang ingin dicapai pada area Penataan Tatalaksana adalah sebagai berikut :

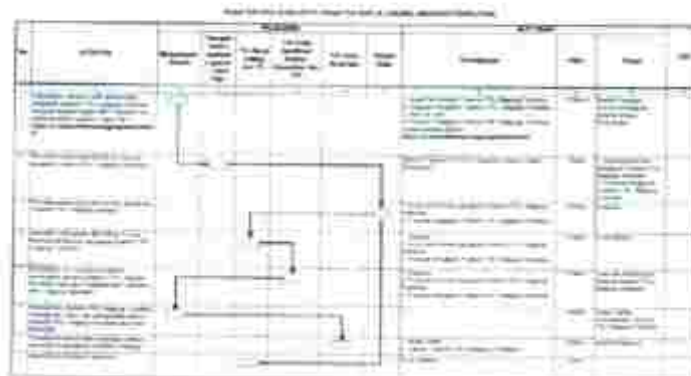
- 1) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di BBPP Ketindan;
- 2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di BBPP Ketindan;
- 3) Meningkatnya kinerja BBPP Ketindan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPP Ketindan terutama pada kegiatan utama penyelenggaraan pelatihan telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada proses bisnis serta dalam rangka pelayanan prima juga dibentuk system aplikasi guna mempercepat proses pemberian pelayanan seperti Lapor Pak untuk layanan permohonan PKL/ Magang, Halowid untuk layanan Konsultasi Agribisnis dan Sahabat Integritas untuk layanan aduan apabila terdapat penyelewengan.

Gambar 8. SOP Layanan Permohonan PKL/Magang BBPP Ketindan



b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

- Pengukuran Kinerja menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi MyIntress, EMonev, ESAKIP, SIMAN, LP5 – LP9/10, SAKTI, SMART, CORETAX dan SIMPONI;
- Operasionalisasi Manajemen SDM menggunakan teknologi informasi seperti EFormasi, SIASN, SIMASN, SINERGI, HRIS (*Human Resource Information System*);
- Pemberian Layanan Publik menggunakan teknologi informasi seperti SIMPHONI EMAS, PINTERTANI, LMS, SIPEPSI, Halowid, Lapor Pak, Srikandi.

c. Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BBPP Ketindan telah menetapkan Keputusan Kepala BBPP Ketindan Nomor 12/Kpts/HM.130/I.14.1/02/2025 tentang Tim PID dan Website dan penetapan Daftar Informasi Publik yang tertuang di Keputusan

Kepala BBPP Ketindan Nomor 02/Kpts/HM.130/I.15.1/06/2025 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2025 sejumlah 35 Informasi.

Pada Tahun 2024 BBPP Ketindan memperoleh Penghargaan Peringkat 5 Unit Kerja Eselon II Kategori Informatif dan Penghargaan Penderasan Informasi Publik Terbaik III. Tahun 2025 BBPP Ketindan masuk 10 Besar Unit Kerja Eselon II Kategori Informatif dan 10 Besar Petugas PPID Terbaik a.n. Nadif Ilmiah, S.P. (*masih proses pemeringkatan*).

Gambar 9. Penghargaan Peringkat 5 Kategori Informatif dan Peringkat 3 Penderasan Informasi Tahun 2024



3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Penataan Sistem Manajemen SDM ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di BBPP Ketindan. Target yang ingin dicapai pada area Penataan Sistem Manajemen SDM adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur BBPP Ketindan;
- 2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur BBPP Ketindan;
- 3) Meningkatnya disiplin SDM aparatur BBPP Ketindan;

- 4) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur BBPP Ketindan;
- 5) Meningkatnya profesionalisme SDM BBPP Ketindan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
 Penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai telah dilakukan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing jabatan dibuktikan dengan Dokumen Analisis Jabatan, Dokumen Analisis Beban Kerja, dan Dokumen Peta Jabatan. Selanjutnya telah dilaksanakan Pengusulan formasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, perpindahan jabatan lain dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional sebanyak 3 pegawai dan dilakukan bimbingan kinerja untuk jabatan pelaksana yang naik kelas jabatan dari kelas jabatan 6 ke kelas jabatan 7. Selain itu Pengadaan tahun 2025 terdapat pegawai baru yang masuk ke BBPP Ketindan dengan rincian 3 CPNS, 5 PPPK Tahap 1, 21 PPPK Tahap 2 dan 1 PPPK Paruh Waktu.

Gambar 10. Usulan Peta Jabatan BBPP Ketindan Tahun 2025

- b. Pola Mutasi Internal

BBPP Ketindan telah melakukan pengembangan karir pegawai melalui mutasi internal dalam unit kerja. Berdasarkan Keputusan Kepala BBPP Ketindan Nomor 08/Kpts/OT.210/I.14.1/01/2025 tentang Penetapan Pemangku Jabatan BBPP Ketindan tanggal 3 Januari 2025 telah dilakukan mutasi internal atas nama Suparjo, SST. Selain itu juga dilakukan rotasi internal Ketua Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur, Sertifikasi

Profesi dan LKPIA, Program dan Kerjasama serta Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 183/Kpts/KP.230 /I/09/2025 tanggal 16 September 2025.

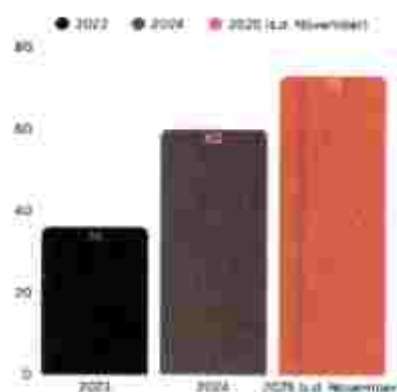
c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

BBPP Ketindan telah menetapkan Petunjuk Teknis *Training Need Analysis* berdasarkan Keputusan Kepala BBPP Ketindan Nomor 11/Kpts/KP.010/ I.15.1/2/2025 tentang Petunjuk Teknis dan Tim Pelaksana TNA dan telah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan.

Selanjutnya disusun rencana pengembangan kompetensi berdasarkan *Training Need Analysis*, mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dan kesenjangan kompetensi dengan standar kompetensi masing masing jabatan.

Dalam pengembangan kompetensi, pegawai BBPP Ketindan telah memperoleh kesempatan/ hak yang sama untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan kompetensi lainnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan grafik kenaikan jumlah pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi sampai dengan November 2025.

Gambar 11. Grafik Jumlah Pengembangan Kompetensi s.d. November 2025



d. Penetapan Kinerja Individu

Seluruh pegawai BBPP Ketindan setiap tahunnya melakukan penetapan kinerja individu dalam bentuk Perjanjian Kerja dan Rencana Aksi. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya dengan melakukan Cascading Kinerja melalui Matrik Peran Hasil (MPH). Adapun pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik melalui aplikasi dashboard sinergi.pertanian.go.id.

Gambar 12. Penetapan Kinerja dan MPH BBPP Ketindan Tahun 2025

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

BBPP Ketindan telah menerapkan penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai antara lain:

- Telah ditetapkan Keputusan Kepala BBPP Ketindan Nomor 21/Kpts/OT.080/I.14.1/01/2025 tentang Pedoman Pemberian Reward dan Punishment BBPP Ketindan;
- Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS;
- Dilakukan sosialisasi dan internalisasi Disiplin ASN baik secara langsung melalui Kegiatan Apel Pagi (Senin dan Rabu) ataupun melalui media sosial dan media cetak;
- Dilakukan pemotongan tunjangan kinerja apabila terdapat pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja;
- Dibentuk sistem *Human Resource Information System* (HRIS) BBPP Ketindan terdapat menu akumulasi keterlambatan masing masing pegawai.

f. Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem informasi kepegawaian menggunakan teknologi informasi seperti EFormasi, SIASN, SIMASN, SINERGI, HRIS (*Human Resource Information System* HRIS).

4. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja BBPP Ketindan. Keterlibatan pimpinan akan menjadi pendorong dalam tercapainya tujuan organisasi, pada area ini Kepala BBPP

Ketindan terlibat secara langsung dalam penyusunan Perencanaan seperti penyusunan RKA-KL, RKT dan Rencana Strategis serta terlibat langsung dalam penyusunan penetapan kinerja. Selanjutnya Kepala BBPP Ketindan pun memantau pencapaian kinerja secara berkala. Adapun target yang ingin dicapai pada area Penguatan Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kinerja BBPP Ketindan;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas BBPP Ketindan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a. Keterlibatan Pimpinan

Kepala BBPP Ketindan terlibat dalam penyusunan perencanaan, penetapan kinerja dan pemantauan kinerja pegawai BBPP Ketindan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan yaitu 1) Penandatanganan dan Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan 4 sasaran kegiatan utama, 2) Mengikuti penyusunan RKAKL Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 16 – 19 Juli 2025, 3) Mengikuti reviu APIP dan finalisasi RKAKL Alokasi Anggaran Tahun 2026 pada tanggal 4 – 6 Agustus 2025 di Mustari dan 3 – 6 Oktober 2025 di Polbangtan Bogor, 4) Kegiatan Rapat Internal lainnya, seperti Rapat penarikan anggaran dan dilanjut pembahasan kegiatan BBPP Ketindan Tahun Anggaran 2025, Rapat percepatan realisasi anggaran, Rapat perencanaan revisi PNBPN dan rapat lainnya.

Gambar 13. Kegiatan Rapat Perencanaan Kinerja Tahun 2025



b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

BBPP Ketindan telah menyusun dokumen perencanaan yang dibuktikan dengan dokumen dokumen sebagai berikut :

- Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025;
- Dokumen Indikator Kinerja Utama;
- Dokumen DIPA Tahun Anggaran 2025;

- Dokumen POK/RKAKL/ Draft Renstra Tahun 2025;
- Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025; dan
- Matrik Peran Hasil (MPH) Tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja BBPP Ketindan dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja yang telah disusun setiap triwulan. Pengukuran kinerja bukan hanya sekadar aktivitas penilaian, melainkan bagian internal dari manajemen kinerja organisasi yang bertujuan mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil (*result-oriented management*).

5. Penguatan Pengawasan

Target yang ingin dicapai pada area Penguatan Pengawasan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di BBPP Ketindan;
- 2) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di BBPP Ketindan;
- 3) Meningkatnya sistem integritas di BBPP Ketindan dalam upaya pencegahan KKN.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a. Pengendalian Gratifikasi

BBPP Ketindan telah melaksanakan kegiatan *public campaign* pengendalian gratifikasi diantaranya :

- Penetapan Keputusan Kepala BBPP Ketindan Nomor 14/Kpts/PW.430/I.14.1/01/2025 tentang Penetapan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi BBPP Ketindan Tahun 2025;
- Sosialisasi dan internalisasi melalui apel pagi yang dilaksanakan setiap hari senin dan rabu;
- Penandatanganan komitmen anti korupsi kepada seluruh pegawai BBPP Ketindan;
- Pembuatan dan penyebaran flyer/ infografis/ video anti korupsi di media sosial dan media cetak;

- Pelaksanaan survey integritas kepada seluruh pegawai BBPP Ketindan.

Gambar 14. Public campaign anti KKN melalui media sosial dan media cetak Tahun 2025



b. Penerapan SPIP

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BBPP Ketindan diantaranya :

- Penetapan Keputusan Kepala BBPP Ketindan Nomor 10/Kpts/PW.420/I.14.1/01/2025 tentang Penetapan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Internal BBPP Ketindan Tahun 2025;
- Dilakukan identifikasi resiko disetiap tim kerja;
- Tersertifikasinya ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- Dilakukan pencatatan pada logbook hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa yang didokumentasikan setiap triwulan sekali oleh Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan setiap bulan dan direkap oleh Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi setiap triwulan.

Gambar 15. Sertifikat ISO 37001:2016 Tahun 2025



c. Pengaduan Masyarakat

BBPP Ketindan terbuka apabila pengguna jasa/ masyarakat tidak puas atas layanan yang diberikan oleh BBPP Ketindan, pengguna jasa/ masyarakat dapat melaporkan melalui telepon, surat, email, kotak saran dan aplikasi E-Dumas BBPP Ketindan.

Gambar 16. Portal Pengaduan Masyarakat BBPP Ketindan



Pengaduan masyarakat yang diterima BBPP Ketindan telah ditindaklanjuti yang disampaikan dalam Laporan penanganan pengaduan masyarakat (dumas) yang disusun setiap triwulan.

d. Penanganan Benturan Kepentingan

BBPP Ketindan telah melaksanakan kegiatan penanganan benturan kepentingan diantaranya :

- Penetapan Keputusan Kepala BBPP Ketindan Nomor 22/Kpts/PW.120/I.14/1/2025 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan BBPP Ketindan Tahun 2025;
- Menyelenggarakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan melalui media sosial dan media cetak;
- Telah dilakukan identifikasi benturan kepentingan;

- Dilakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut benturan kepentingan yang disusun setiap semester.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada BBPP Ketindan. Standar pelayanan publik pada BBPP Ketindan meliputi Penyelenggaraan pelatihan di bidang pertanian, Penyelenggaraan kerjasama (ketenagaan) pelatihan, Sertifikasi profesi di bidang pertanian dan Layanan pendukung di bidang pertanian seperti Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana/ Penyewaan Mess dan Auditorium/Hall, Konsultasi Agribisnis, Magang/ Praktek Kerja Lapang (PKL), Studi Banding, Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PID) dan Eduwisata. Target yang ingin dicapai pada area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di BBPP Ketindan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a. Standar Pelayanan

Beberapa kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya standar pelayanan di BBPP Ketindan antara lain :

- Penetapan Keputusan Kepala BBPP Ketindan Nomor 6/Kpts/OT.080/I.14.1/11/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik BBPP Ketindan;
- Adanya Maklumat pelayanan baik dalam bentuk media cetak maupun media social;
- Reviu perbaikan standar pelayanan yang dilaksanakan setiap setahun sekali melalui Forum Konsultasi Publik (terakhir dilaksanakan pada tanggal 7 November 2025 di Aula BBPP Ketindan);
- Publikasi pemberitaan di berbagai media (sampai dengan November 2025 sebanyak 869 berita yang telah terpublish di berbagai media);

- Dilakukan penderasan informasi melalui *Like, Comment and Share* pada postingan informasi akun media sosial BBPP Ketindan, BPPSDMP dan Kementerian Pertanian.
- Pada Tahun 2024 BBPP Ketindan memperoleh Penghargaan Peringkat 5 Unit Kerja Eselon II Kategori Informatif dan Penghargaan Penderasan Informasi Publik Terbaik III. Sedangkan pada tahun 2025 BBPP Ketindan masuk 10 Besar Unit Kerja Eselon II Kategori Informatif dan 10 Besar Petugas PPID Terbaik a.n. Nadif Ilmiah, S.P. (*masih proses pemeringkatan*) dan penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 "Micessla".

Gambar 17. Penghargaan BBPP Ketindan Tahun 2025



b. Budaya Pelayanan Prima

Beberapa kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya budaya pelayanan prima di BBPP Ketindan antara lain :

- Dilakukan peningkatan kompetensi budaya pelayanan prima atas nama Nadif Ilmiah, Heny Wulansari dan Rama Santoso;
- Pelayanan mudah diakses melalui berbagai media seperti SIPPN, Media Cetak, Media Sosial, Website, Whatsapp Center dan Datang langsung ke kantor;
- Terdapat inovasi pelayanan seperti SIMPHONI EMAS, MICESSLA, HALOWID, SIPEPSI, LAPOR PAK, EDUMAS, TEGAR PIROLISATOR;
- Terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pelayanan apabila melanggar aturan yang ditetapkan pada Keputusan Kepala Balai Nomor 21/Kpts/OT.080/I.14.1/01/2025 tentang Pedoman

pemberian Reward dan Punishment pada pelaksana dan pemberian kompensasi;

- Terdapat sistem pemberian kompensasi berupa tumbler, mug dan bolpoin apabila ada ketidaksesuaian dalam pemberian pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan kepada pengguna layanan yang ditetapkan pada Keputusan Kepala Balai Nomor 21/Kpts/OT.080/I.14.1/01/2025 tentang Pedoman pemberian Reward dan Punishment pada pelaksana dan pemberian kompensasi;
- Penambahan fasilitas ramah disabilitas dan fasilitas ramah anak.

Gambar 18. Fasilitas Ramah Disabilitas dan Ramah Anak



c. Pengelolaan Pengaduan

Beberapa kegiatan dalam rangka pengelolaan pengaduan di BBPP Ketindan antara lain :

- Terdapat media pengaduan dan konsultasi terintegrasi dengan SP4N-Lapor dan inovasi pengaduan masyarakat secara online melalui aplikasi edumas BBPP Ketindan dan Sahabat Integritas "SINTA" BBPP Ketindan;
- Telah membentuk tim pengelola pengaduan dan konsultasi melalui SK Kepala Balai Nomor 10/Kpts/PW.300/PW.300/I.14.1/04/2025 tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada BBPP Ketindan Tahun 2025;
- Dilakukan pemantauan, dan evaluasi serta tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yang masuk dan disusun laporan setiap triwulan sekali

d. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

BBPP Ketindan telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dibuktikan dengan dokumen Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang disusun setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan. Pelaporan Hasil SKM dapat dilihat melalui website dan infografis SKM melalui media sosial BBPP Ketindan.

Gambar 19. Grafik Nilai Survey Kepuasan Masyarakat BBPP Ketindan Tahun 2024 s.d. 2025



Dilakukan monitoring evaluasi dan tindak lanjut terhadap 3 unsur nilai terbawah dibuktikan pada Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang disusun setiap semester. Pada semester 1 tahun 2025 telah ditindaklanjuti **100%** atas 3 unsur nilai terendah SKM periode semester 1 tahun 2025 yaitu pada unsur biaya/tarif, waktu penyelesaian dan produk spesifikasi jenis layanan.

II. KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

1. Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel

Berdasarkan hasil survey pengukuran atas Persepsi Anti Korupsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK) didapatkan hasil rata rata responden menjawab pada skala mendekati skor 4 sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa **pelayanan anti korupsi di BBPP Ketindan tidak ada hal yang melanggar dalam pelaksanaan anti korupsi sesuai item pada kuesioner dengan nilai 3.80.**

2. Pelayanan Publik Yang Prima

Berdasarkan hasil survey pengukuran atas Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP) didapatkan hasil

rata rata responden menjawab pada skala mendekati skor 4 yang artinya **kualitas layanan di BBPP Ketindan baik dengan nilai 3.71.**

B. KENDALA

Secara umum pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas di lingkungan BBPP Ketindan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala atau hambatan yang berarti.

BAB III

PENUTUP

Dari hasil uraian monitoring dan evaluasi yang dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Dalam membangun Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Manajemen Perubahan. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Rencana Kerja pada area Manajemen Perubahan Tahun 2025 telah terealisasi 100%.

2. Penataan Tatalaksana

Dalam membangun Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penataan Tatalaksana. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Indikator dilakukannya penataan tata laksana ini adalah tersusunnya prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan utama, *e-office*, dan keterbukaan informasi publik. Rencana Kerja pada area Penataan Tatalaksana Tahun 2025 telah terealisasi 100%.

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Penataan Sistem Manajemen SDM Tahun 2025 telah terealisasi 100%.

4. Penguatan Akuntabilitas

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penguatan Akuntabilitas. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja di BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Penguatan Akuntabilitas Tahun 2025 telah terealisasi 100%.

5. Penguatan Pengawasan

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kepala BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penguatan Pengawasan. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Kepala BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Penguatan Pengawasan Tahun 2025 telah terealisasi 100% dikarenakan wilayah "Whistle Blowing System" tidak dilaksanakan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan akan tetapi melekat di Kementerian Pertanian.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025 telah terealisasi 100%.

[illegible]

[illegible]

	Pendidikan	Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan	Jawaban	Catatan / Keterangan / Penjelasan	Jawaban	Nilai	%	Catatan / Keterangan / Penjelasan
	a. Implementasi manajemen SDM untuk menggunakan teknologi informasi		a. Jika unit memiliki implementasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi b. Jika unit memiliki implementasi SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpadu c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasional organisasi SDM	A/B/C	A	Tidak hanya nilai menggunakan IT dalam implementasi operasionalnya SDM yaitu: 1. HRM AKA 2. HRMS 3. E-HRM 4. E-PERMANA 5. Outsource Organisasi (Human Resource Information System) HRP Sistem Berbasis Manajemen SDM	Sesuai dengan 1. HRM APP 2. HRMS 3. E-HRM 4. E-PERMANA 5. Database Organisasi (Human Resource Information System) HRP Berbasis:	A	100	https://www.apak.com/docs/dokumen/168101/168101%20-%20HRM.pdf
	b. Penerapan pelayanan kepada publik untuk menggunakan teknologi informasi		a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpadu/terkait layanan dan terintegrasi minimal b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpadu c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi	A/B/T	A	Tidak hanya nilai menggunakan IT dalam memberikan pelayanan publik yaitu: 1. Aplikasi SIPDPR 2. Aplikasi Siskamdi 3. Learning Management System (LMS) 4. Aplikasi Monev 5. Aplikasi Lapor PIS 6. Aplikasi Potensial 7. Aplikasi SiRahmat Keras PIS 8. Laporan Kegiatan Mandiri (LMK, RPKM) 9. Laporan Monitoring dan Evaluasi SiRahmat Keras 10. Manual Book Regulasi dan LKS	Sesuai dengan 1. Aplikasi SIPDPR 2. Aplikasi Siskamdi 3. Learning Management System (LMS) 4. Aplikasi Monev 5. Aplikasi Lapor PIS 6. Aplikasi Potensial 7. Aplikasi SiRahmat Keras PIS 8. Laporan Kegiatan Mandiri (LMK, RPKM) 9. Laporan Monitoring dan Evaluasi SiRahmat Keras 10. Manual Book Regulasi dan LKS	A	100	https://www.apak.com/docs/dokumen/168101/168101%20-%20HRM.pdf
	c. Tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban terhadap informasi dalam penggunaan sistem dan pemanfaatan layanan kepada publik		a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban terhadap informasi dalam penggunaan sistem dan pemanfaatan layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban terhadap informasi dalam penggunaan sistem dan pemanfaatan layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala c. Jika tidak berupaya monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban terhadap informasi dalam penggunaan sistem dan pemanfaatan layanan kepada publik	A/B/C	A	Tidak hanya nilai melakukan monitoring terkait pemenuhan kewajiban terhadap informasi berupa aplikasi Monev, Lapor Pak, SiRahmat Keras, Potensial, RPKM, SIPK, LPK-16	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Monev 2024 - 2025 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Lapor Pak 2024 - 2025 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SiRahmat Keras 2024 - 2025 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Aplikasi RPKM, SIPK, LPK-16 2024 - 2025 5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Rapor Pak 2024 - 2025	A	100	https://www.apak.com/docs/dokumen/168101/168101%20-%20HRM.pdf
	d. Keterbukaan Informasi Publik	0.50						0.50	100.00%	

[illegible]

Penilaian			Debet	Kriteria Nilai	Pilihan	Jawaban	Catatan/Keterangan/Perbaikan	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Perbaikan
				d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kompetensi/hak untuk mengikuti dilatih maupun pengembangan kompetensi lainnya e. Jika sebagai timor pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kompetensi/hak untuk mengikuti dilatih maupun pengembangan kompetensi lainnya f. Jika sebagai timor pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kompetensi/hak untuk mengikuti dilatih maupun pengembangan kompetensi lainnya g. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kompetensi/hak untuk mengikuti dilatih maupun pengembangan kompetensi lainnya	A/B/C/D	A	Unit kerja telah memberikan kesempatan pegawai dalam meningkatkan kompetensinya melalui dilatih	1. Dokumen Realistisitas Pengembangan Kompetensi BPPF Retradus 2023 2. Dokumen Realistisitas Pengembangan Kompetensi BPPF Retradus 2024 3. Dokumen Realistisitas Pengembangan Kompetensi BPPF Retradus 2025 4. BPPF Pengembangan Kompetensi	A	100	https://www.ppt.com/2023/03/03/realistisitas-bppf-retadus-2023/
				a. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai seperti... b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai... c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian pegawai... d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai	A/B/C/D	B	Unit kerja telah memberikan kesempatan pegawai dalam meningkatkan kompetensinya melalui dilatih	1. Dokumen Realistisitas Pengembangan Kompetensi BPPF Retradus 2023 2. Dokumen Realistisitas Pengembangan Kompetensi BPPF Retradus 2024 3. Dokumen Realistisitas Pengembangan Kompetensi BPPF Retradus 2025	B	80	https://www.ppt.com/2023/03/03/realistisitas-bppf-retadus-2023/
				f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja pegawai	A/B/C	B	Unit kerja telah melakukan evaluasi kinerja pegawai yang telah mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Semester 1 Tahun 2023	B	80	https://www.ppt.com/2023/03/03/realistisitas-bppf-retadus-2023/
10. Penetapan Kinerja Individu			100						100	100.00%	

Penilaian			Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan	Jawaban	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
		a. Terdapat portmap kinerja individu yang terkait dengan perubahan kinerja organisasi		a. Jika seluruh portmap kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta portmap kinerja individu dengan kinerja kinerja pegawai (IKG) b. Jika sebagian besar portmap kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Jika sebagian kecil portmap kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	A	Kinerja individu yang telah sesuai dengan IKI dan PK Pegawai	A	100		https://drive.google.com/drive/folders/1XU5b4XFP3g22g2nd3J8KdW13DQ
		b. Ukuran kinerja individu telah sesuai dengan diagram indikator kinerja individu yang diadopsi		a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah sesuai disesuaikan dengan indikator kinerja individu yang diadopsi serta menggunakan agar model b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah sesuai disesuaikan dengan indikator kinerja individu yang diadopsi c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah sesuai disesuaikan dengan indikator kinerja individu yang diadopsi d. Jika ukuran kinerja individu telah sesuai disesuaikan dengan indikator kinerja individu yang diadopsi	A/B/C/D	A	Kinerja individu yang telah sesuai dengan IKI dan PK Pegawai	A	100		https://drive.google.com/drive/folders/1XU5b4XFP3g22g2nd3J8KdW13DQ
		c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara teratur b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara teratur c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara teratur d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara teratur e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A/B/C/D/E	A	Uat kerja telah melakukan pengukuran kinerja individu per tahun	A	100		https://drive.google.com/drive/folders/1XU5b4XFP3g22g2nd3J8KdW13DQ
		d. Hasil penilaian kinerja individu telah dilakukan dasar untuk pemberian reward		Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dilakukan dasar untuk pemberian reward (dasar: pengembangan karir individu, atau penghargaan)	Ya/Tidak	Ya	Hasilnya telah melakukan pengukuran kinerja individu untuk pengembangan karir dan pemberian reward	Ya	100		https://drive.google.com/drive/folders/1XU5b4XFP3g22g2nd3J8KdW13DQ
v. Pengukuran Aturan Disiplin/kode E			0.75						0.75	100.00%	

[illegible]

Pencapaian		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan	Jumlah	Catatan/Keterangan/Penggunaan	Jumlah	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penggunaan
	1. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja :		a. Jika seluruh pengisian kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja b. Jika sebagian pengisian kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja c. Jika seluruh pengisian kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja	A/B/C	A	1. Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2023, 2024, 2025) 2. Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2023, 2024, 2025) 3. Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2023, 2024, 2025) 4. Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2023, 2024, 2025)	A	1.00		https://lra.go.id/portal/portal/13480000/13480000/13480000/13480000
	2. Terdapat sistem informasi/website/indikator kinerja		a. Jika terdapat sistem informasi/website/indikator kinerja	Ya/Tidak	Ya	1. Terdapat sistem informasi/website/indikator kinerja 2. Terdapat sistem informasi/website/indikator kinerja 3. Terdapat sistem informasi/website/indikator kinerja 4. Terdapat sistem informasi/website/indikator kinerja	Ya	1.00		https://lra.go.id/portal/portal/13480000/13480000/13480000/13480000
	3. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kualitas SDM yang bertanggung jawab dalam kinerja		a. Jika seluruh SDM pengelola administrasi kinerja/komponen b. Jika sebagian SDM pengelola administrasi kinerja/komponen c. Jika seluruh SDM pengelola administrasi kinerja belum ada yang kompeten	A/B/C	A	1. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kualitas SDM yang bertanggung jawab dalam kinerja 2. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kualitas SDM yang bertanggung jawab dalam kinerja 3. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kualitas SDM yang bertanggung jawab dalam kinerja 4. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kualitas SDM yang bertanggung jawab dalam kinerja	A	1.00		https://lra.go.id/portal/portal/13480000/13480000/13480000/13480000
B. Penguatan Pergawahan		7.50						6.90	92.00%	
A. Penguatan Gratifikasi		1.50						1.50	100.00%	
	1. Terdapat sistem/pada kampanye		a. Jika seluruh kampanye telah dilaksanakan secara baik b. Jika sebagian kampanye telah dilaksanakan secara baik c. Jika belum dilaksanakan kampanye	A/B/C	A	1. Terdapat sistem/pada kampanye 2. Terdapat sistem/pada kampanye 3. Terdapat sistem/pada kampanye 4. Terdapat sistem/pada kampanye 5. Terdapat sistem/pada kampanye 6. Terdapat sistem/pada kampanye	A	1.00		https://lra.go.id/portal/portal/13480000/13480000/13480000/13480000
	2. Penguatan gratifikasi telah dilaksanakan		a. Jika Unit Penguatan Gratifikasi, penguatan gratifikasi telah dilaksanakan secara baik b. Jika Unit Penguatan Gratifikasi, penguatan gratifikasi telah dilaksanakan secara baik c. Jika Unit Penguatan Gratifikasi, penguatan gratifikasi belum dilaksanakan secara baik d. Jika Unit Penguatan Gratifikasi, penguatan gratifikasi belum dilaksanakan secara baik	A/B/C/D	A	1. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kualitas SDM yang bertanggung jawab dalam kinerja 2. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kualitas SDM yang bertanggung jawab dalam kinerja 3. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kualitas SDM yang bertanggung jawab dalam kinerja 4. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kualitas SDM yang bertanggung jawab dalam kinerja 5. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kualitas SDM yang bertanggung jawab dalam kinerja 6. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kualitas SDM yang bertanggung jawab dalam kinerja	A	1.00		https://lra.go.id/portal/portal/13480000/13480000/13480000/13480000
C. Penguatan Sistem Pengendalian		1.50						1.50	100.00%	

[illegible]

	Pemilaian	Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan	Jumlah	Catatan/Keterangan/Pemilaian	Jumlah	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Pemilaian
	d. RPT telah diformulasikan dan diformulasikan kepada seluruh pihak terkait.		a. Jika RPT telah diformulasikan dan diformulasikan kepada seluruh pihak terkait. b. Jika RPT telah diformulasikan dan diformulasikan kepada seluruh pihak terkait. c. Jika RPT telah diformulasikan dan diformulasikan kepada seluruh pihak terkait.	A/B/C	3	1. RPT telah diformulasikan dan diformulasikan kepada seluruh pihak terkait. 2. RPT telah diformulasikan dan diformulasikan kepada seluruh pihak terkait. 3. RPT telah diformulasikan dan diformulasikan kepada seluruh pihak terkait. 4. RPT telah diformulasikan dan diformulasikan kepada seluruh pihak terkait. 5. RPT telah diformulasikan dan diformulasikan kepada seluruh pihak terkait. 6. RPT telah diformulasikan dan diformulasikan kepada seluruh pihak terkait. 7. RPT telah diformulasikan dan diformulasikan kepada seluruh pihak terkait.	A	100		https://www.google.com/search?q=RPT+Tesis+2023&rlz=C343
	iii. Pengaduan Masyarakat	1.50	a. Jika unit kerja mengimplementasikan secara baik kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga sumber internal terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan secara baik kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi. c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat.	A/B/C	4	1. Terdapat pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 2. Terdapat pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 3. Terdapat pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 4. Terdapat pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 5. Terdapat pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 6. Terdapat pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja.	A	100	100.00%	https://www.google.com/search?q=Pengaduan+Masyarakat+Tesis+2023&rlz=C343
	b. pengaduan masyarakat ditindaklanjuti		a. pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	Ya/Tidak	Ya	1. Terdapat pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 2. Terdapat pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 3. Terdapat pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 4. Terdapat pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 5. Terdapat pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 6. Terdapat pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja.	Ya	100		https://www.google.com/search?q=Pengaduan+Masyarakat+Tesis+2023&rlz=C343
	c. telah dilakukan monitoring dan evaluasi dan peningkatan pengaduan masyarakat		a. Jika peningkatan pengaduan masyarakat dilaksanakan dan evaluasi secara berkala. b. Jika peningkatan pengaduan masyarakat dilaksanakan dan evaluasi secara berkala. c. Jika peningkatan pengaduan masyarakat dilaksanakan dan evaluasi secara berkala.	A/B/C	3	1. Terdapat peningkatan pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 2. Terdapat peningkatan pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 3. Terdapat peningkatan pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 4. Terdapat peningkatan pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 5. Terdapat peningkatan pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 6. Terdapat peningkatan pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja.	A	100		https://www.google.com/search?q=Pengaduan+Masyarakat+Tesis+2023&rlz=C343
	d. Hasil evaluasi dan peningkatan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan		a. Jika seluruh hasil evaluasi dan peningkatan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan secara baik. b. Jika seluruh hasil evaluasi dan peningkatan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan secara baik. c. Jika hasil evaluasi dan peningkatan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan secara baik.	A/B/C	3	1. Terdapat peningkatan pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 2. Terdapat peningkatan pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 3. Terdapat peningkatan pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 4. Terdapat peningkatan pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 5. Terdapat peningkatan pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja. 6. Terdapat peningkatan pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh unit kerja.	A	100		https://www.google.com/search?q=Pengaduan+Masyarakat+Tesis+2023&rlz=C343
	iv. Whistle Blowing System	1.50						1.50	100.00%	

Penilaian			Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan	Jumlah	Catatan/Keterangan/Penilaian	Jumlah	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penilaian
		a. Whistle Blowing System sudah diterapkan		a. Jika unit kerja menunjukkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga memiliki secara tidak terduga Whistle Blowing System yang sesuai dengan keseluruhan unit kerja b. Jika unit kerja menunjukkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing System	A/B/C	A		A	100		
		b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System		a. Jika penerapan Whistle Blowing System dilaksanakan dan evaluasi secara berkala b. Jika penerapan Whistle Blowing System dilaksanakan dan evaluasi tidak secara berkala c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum dilaksanakan dan evaluasi	A/B/C	B		A	100		
		c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah dilaksanakan		a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah dilaksanakan oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah dilaksanakan oleh unit kerja c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum dilaksanakan	A/B/C	A		A	100		
		v. Penanganan Benturan Kepentingan	1.50						0.90	60.00%	
		a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam ruang fungsi utama		a. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh ruang fungsi utama b. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan hanya pada sebagian ruang fungsi utama c. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian kecil ruang fungsi utama d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam ruang fungsi utama	A/B/C/D	B	Unit kerja telah membuat SK Tentang Kepentingan dan mengidentifikasi potensi benturan kepentingan dalam bidang	1. Kebijakan Risiko Benturan Kepentingan dan Identifikasi Benturan Kepentingan 2024, 2019 2. Kebijakan Risiko Benturan Kepentingan 2024, 2019 3. Laporan Identifikasi Benturan Kepentingan (Matrik) Tahun 2023, 2024, 2025 4. RK Penanggulangan 2024, 2025 5. Laporan Whistle TI Penanganan Benturan Perilaku Tahun 2024, 2025 6. SOP Benturan Kepentingan	D	90	https://1904.scribd.com/document/121021822/45563806-13-5305-1634

Penilaian			Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan	Jumlah	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Jumlah	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
		1. Pelaksanaan Rencana Keperawatan telah dilaksanakan/tertunda		a. Jika pelaksanaan Rencana Keperawatan dilaksanakan/tertundadibandingkan ke seluruh layanan b. Jika pelaksanaan Rencana Keperawatan dilaksanakan/tertundadibandingkan ke sebagian besar layanan c. Jika pelaksanaan Rencana Keperawatan dilaksanakan/tertundadibandingkan ke sebagian kecil layanan d. Jika pelaksanaan Rencana Keperawatan belum dilaksanakan/tertundadibandingkan ke seluruh layanan	A/B/C/D	8	1. Jika kerja telah dilaksanakan Pelaksanaan Rencana Keperawatan sesuai seluruh layanan	8	80%	1. Chelingsa, Runt Tugas dan Laporan Pelaksanaan RPI (Rencana Keperawatan) Tahun 2024 2. Standar Nasional dan Internasional NPOC 2018 3. Laporan Implementasi 2023 4. Chelingsa Workshop SIP 2024 5. Rencana Rencana Keperawatan 2024, 2025	
		2. Pelaksanaan Rencana Keperawatan telah dilaksanakan/tertunda		a. Jika pelaksanaan Rencana Keperawatan dilaksanakan/tertundadibandingkan ke seluruh layanan b. Jika pelaksanaan Rencana Keperawatan dilaksanakan/tertundadibandingkan ke sebagian besar layanan c. Jika pelaksanaan Rencana Keperawatan dilaksanakan/tertundadibandingkan ke sebagian kecil layanan d. Jika pelaksanaan Rencana Keperawatan belum dilaksanakan/tertundadibandingkan ke seluruh layanan	A/B/C/D	8	1. Jika kerja telah dilaksanakan Pelaksanaan Rencana Keperawatan	8	80%	1. Chelingsa, Runt Tugas dan Laporan Pelaksanaan RPI (Rencana Keperawatan) Tahun 2024, 2025	
		3. Telah dilakukan evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Keperawatan		a. Jika pelaksanaan Rencana Keperawatan dipantau secara berkala oleh unit kerja b. Jika pelaksanaan Rencana Keperawatan dipantau secara berkala oleh unit kerja c. Jika pelaksanaan Rencana Keperawatan belum dipantau secara berkala oleh unit kerja	A/B/C	8	1. Jika kerja telah dilaksanakan Pelaksanaan Rencana Keperawatan	8	80%	1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Keperawatan 2023 2. Laporan Monev TS Gering Tahun 2024 (Skor 1.2.3.4) 3. Laporan Monev TS Gering Tahun 2025 (Skor 1.2.3)	
		4. Hasil evaluasi dari Pelaksanaan Rencana Keperawatan telah dilaksanakan/tertunda		a. Jika seluruh hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Keperawatan telah dilaksanakan/tertunda oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Keperawatan telah dilaksanakan/tertunda oleh unit kerja c. Jika belum ada hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Keperawatan yang dilaksanakan/tertunda oleh unit kerja	A/B/C	8	1. Jika kerja telah dilaksanakan Pelaksanaan Rencana Keperawatan	8	80%	1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Keperawatan 2023 2. Laporan Monev TS Gering Tahun 2024 (Skor 1.2.3.4) 3. Laporan Monev TS Gering Tahun 2025 (Skor 1.2.3)	
B. PERINGKATAN KUALITAS PELAYANAN			2.00						4.00	80.00%	
1. Standar Pelayanan			1.00						1.00	100.00%	

Pendidikan	Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan	Jumlah	Catatan / Keterangan / Penjelasan	Jumlah	Nilai	%	Catatan / Keterangan / Penjelasan
d. Hasil pendidikan diberikan skor standar pelayanan dan indikator pelayanan		yy. Hasil pendidikan diberikan skor standar pelayanan dan indikator pelayanan	A/B/C/D	10	Hasil kerja tidak menunjukkan penilaian atau standar pelayanan dan indikator pelayanan melalui Website dan penyesuaian poster di Ruang PPID	10	100		https://www.google.com/maps/place/156.7.541.2033/@0.0000,100.0000,15z
b. Rata-rata Pelayanan Prima	1.00						8.81	88.67%	
a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tenaga profesional bidang pelayanan prima		a. Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi pelayanan prima secara berkala/teratur dan/atau sebagai bentuk kegiatan/pelaksanaan layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dilakukan evaluasi yang meliputi kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan b. Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi pelayanan prima dan/atau sebagai kegiatan/pelaksanaan layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan c. Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi pelayanan prima secara teratur baik sebagai bentuk kegiatan/pelaksanaan layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan d. Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi pelayanan prima secara teratur berkala, sehingga tenaga layanan lebih terampil yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan e. Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi pelayanan prima dan/atau sebagai kegiatan/pelaksanaan layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	A/B/C/D/E	5	Hasil kerja tidak menunjukkan kompetensi petugas layanan dengan mengikuti Bimbingan Peningkatan Prima di bagian layanan, kompetensi, prima	5	88.67		https://www.google.com/maps/place/156.7.541.2033/@0.0000,100.0000,15z
b. Informasi tentang pelayanan sudah diadopsi melalui berbagai media		a. Seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terdistribusi dengan standar informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) namun belum terdistribusi dengan standar informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh informasi tentang	A/B/C/D	5	Pelayanan di SMPN Kertajaya sudah diadopsi pada berbagai media seperti website dan media sosial lainnya dan Twitter	5	100		https://www.google.com/maps/place/156.7.541.2033/@0.0000,100.0000,15z

[illegible]

Pendidikan	Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan	Jawaban	Catatan/Keterangan/Referensi	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Referensi
1. Terdaftar secara perusahaan		a. Jika unit kerja telah memiliki semua pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan terintegrasi pelayanan dengan masyarakat serta telah terakreditasi b. Jika unit kerja telah memiliki semua pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan terintegrasi pelayanan dengan masyarakat c. Jika unit kerja memiliki semua yang terpadu, terpadu dan terintegrasi dari semua yang sudah ada d. Jika unit kerja telah memiliki semua dan terpadu terintegrasi pelaksanaan semua dari instansi pemerintah e. Jika unit kerja belum memiliki semua pelayanan	A/B/C/D/E	B	semua jawaban yang sudah dibuat oleh sistem ini: HEP201, LMS dan Asep Cak	1. Semua jawaban di HEP201 2. Semua jawaban di HEP201 3. Semua jawaban di HEP201 4. Semua jawaban di HEP201 5. Semua jawaban di HEP201 6. Semua jawaban di HEP201 7. Semua jawaban di HEP201 8. Semua jawaban di HEP201 9. Semua jawaban di HEP201 10. Semua jawaban di HEP201	B	100%	https://www.bptk.go.id/
ii. Pengelolaan Pengaduan	1.00							100%	
a. Terdaftar secara perusahaan dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR		a. Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara online dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR b. Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara offline dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR c. Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara online dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR d. Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara offline dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR e. Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara online dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR	A/B/C/D/E	B	Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara online dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR	Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara online dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR	B	100%	https://www.bptk.go.id/
b. Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara online dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR		a. Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara online dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR b. Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara offline dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR c. Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara online dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR d. Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara offline dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR e. Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara online dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR	A/B/C/D/E	B	Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara online dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR	Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara online dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR	B	100%	https://www.bptk.go.id/
c. Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara online dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR		a. Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara online dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR b. Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara offline dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR c. Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara online dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR d. Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara offline dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR e. Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara online dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR	A/B/C/D/E	B	Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara online dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR	Terdaftar secara perusahaan dan terpadu secara online dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR	B	100%	https://www.bptk.go.id/

[illegible]

	Penilaian	Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan	Jawaban	Catatan/Keterangan/Pengelasan	Jumlah	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Pengelasan
	5. Perbaikan yang dibuat Agri Perbaikan ialah bagaimana dalam aspek manajemen				3314%	Tahun 2023 Seandainya agri perbaikan, pelatihan aplikasi, pemertan bag terapan perbaikan, perbaikan aplikasi e learning simulasi agri PPTK, pendataan aplikasi agri (suar arwah), simulasi pemertan perbaikan simulasi kementerian, perbaikan dalam pengembangan zona kaji, pemertan/papir literasi dan indikator lain seperti pendataan NIS, Kaji baik, semua pag di	3314%	3314%		https://drive.google.com/direct/135337... https://drive.google.com/direct/135337...
	6. Jumlah Perbaikan yang dibuat			Jumlah	4	Tahun 2023 Seandainya agri perbaikan, pelatihan aplikasi, pemertan bag terapan perbaikan, perbaikan aplikasi e learning simulasi agri PPTK, pendataan aplikasi agri (suar arwah), simulasi pemertan perbaikan simulasi kementerian, perbaikan dalam pengembangan zona kaji, pemertan/papir literasi dan indikator lain seperti pendataan NIS, Kaji baik, semua pag di	4	4		
	7. Jumlah Perbaikan yang telah ditayangkan dalam simulasi manajemen			Jumlah	4	Tahun 2023 Seandainya agri perbaikan, pelatihan aplikasi, pemertan bag terapan perbaikan, perbaikan aplikasi e learning simulasi agri PPTK, pendataan aplikasi agri (suar arwah), simulasi pemertan perbaikan simulasi kementerian, perbaikan dalam pengembangan zona kaji, pemertan/papir literasi dan indikator lain seperti pendataan NIS, Kaji baik, semua pag di	4	4		
	8. Rombatan Peningkatan	1.00					1.00	100.00%		
	Peningkatan rombati kementerian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, dengan adanya bag terapan (simulasi) yang bisa di lakukan pemerintahan	1.00			4/0/0/0/0	Tujuan 2023 Seandainya agri perbaikan, pelatihan aplikasi, pemertan bag terapan perbaikan, perbaikan aplikasi e learning simulasi agri PPTK, pendataan aplikasi agri (suar arwah), simulasi pemertan perbaikan simulasi kementerian, perbaikan dalam pengembangan zona kaji, pemertan/papir literasi dan indikator lain seperti pendataan NIS, Kaji baik, semua pag di	4	4		https://drive.google.com/direct/135337... https://drive.google.com/direct/135337...
	9. Rombatan Budaya Korte	1.00					1.00	100.00%		

Penilaian		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan	Jumlah	Catatan/Keterangan/Perbaikan	Jumlah	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Perbaikan
	Normasi monitoring budaya kerja (SWOT dan monev) organisasi (misal: nilai-nilai organisasi) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari		a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya ditunjukkan dalam etos kerja operasional pelaksanaan kegiatan/Tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum ditunjukkan dalam etos kerja operasional pelaksanaan kegiatan/Tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Budaya monitoring budaya kerja dan nilai-nilai organisasi	A/B/C/D	A	1. Nilai-nilai dasar budaya kerja pada saat sebelum nilai kerja (7,30 WTD), sekarang 122,00 WTD (dan yang paling 16,00 WTD) 2. Pelaporan LKHPN/LABANS tepat Waktu 3. Hasil Pelaksanaan Apot Pagi seminggu dilaksanakan 2 kali (sebelum dan setelah) 4. Tidak ada gap antara On The Spot (OTS) 5. Melaksanakan Ketrampilan (Keterampilan Menjalani pertemuan dari tahun 2023, 2024 dan 2025 (s.d. 2025)		1,00		https://drive.google.com/drive/folders/1G0u0G0XXxM6TQ8u0u000000
2. PENYATAAN TETAPAN		2,50						2,50	73,80%	
1. Peta Proses Bisnis Mampengaruhi		0,50						0,50	87,00%	
	Tidak diuraikan peta proses bisnis dengan alirannya penyederhanaan jabatan		a. Peta proses bisnis telah diuraikan dan mempengaruhi penyederhanaan jabatan b. Peta proses bisnis telah diuraikan dan mempengaruhi penyederhanaan jabatan sebesar 10% jabatan c. Peta proses bisnis telah diuraikan dan mempengaruhi penyederhanaan jabatan kurang dari 10% jabatan d. Peta proses bisnis telah diuraikan dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan	A/B/C/D	B	1. Nilai kerja telah menguraikan Peta Proses Bisnis Peta Proses Bisnis WTD Aktualisasi		0,47		https://drive.google.com/drive/folders/1G0u0G0XXxM6TQ8u0u000000
2. Riset dan Inovasi Berbasis Riset		1,00						0,73	73,00%	
	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien		a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi secara menyeluruh c. Implementasi SPBE belum terintegrasi dan belum mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	Programmer Aplikasi dalam mendukung kinerja mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang lebih dan efisien 1. Aplikasi RPPBM Sistem Informasi Pelayanan Terpadu 2. Aplikasi Sistem 3. Aplikasi RPPBM 4. Sistem 5. Learning Management System 6. Sistem Manajemen Kualitas (RACI/MTD) 7. Sistem Manajemen Risiko/ RPT, LK/BNK 8. Aplikasi Aplikasi Sistem Pelayanan Publik (Daily Mail, LP 1-3, LP 4/10)		1,00		https://drive.google.com/drive/folders/1G0u0G0XXxM6TQ8u0u000000

[illegible]

Penilaian		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan	Jawaban	Catatan/Keterangan/Referensi	Jumlah	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Referensi
	u. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal.		a. Kinerja huruf a telah terpenuhi dan pencapaian nilai pengisian dari manifestasi/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah baik (ada indikator value) dan manifestasi serta dampak/hasilnya secara keseluruhan:	A/B/C/D/E	b	Peningkatan atau program dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja.	A	2,50		https://www.megaupload.com/files/200041702w/4528164_367222.jpg/C00049033
			b. Kinerja huruf a telah terpenuhi dan manifestasi/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah signifikan/dipertegas oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.							
	v. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal.		c. Kinerja huruf d telah terpenuhi dan manifestasi/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat/dampak signifikan/dipertegas oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.	A/B/C/D/E	B	Peningkatan atau program dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja.	B	0,75		https://www.megaupload.com/files/200041702w/4528164_367222.jpg/C00049033
			d. Kinerja huruf e telah terpenuhi dan manifestasi/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah signifikan/dipertegas oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.							
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT		5,00						4,25	85,00%	
a. Kinerja Individu		1,50						1,50	100,00%	

[illegible]

	Pemilihan	Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan	Jumlah	Catatan / Keterangan / Penjelasan	Jawaban	Nilai	%	Catatan / Keterangan / Penjelasan
	1. Analisis Situasi Kinerja			Juduli	9	1. Petunjuk Pengantunan Laporan SDN Pematang Jaya 2. Petunjuk Kegiatan Layanan pengembangan jaringan 3. Nilai PMF Pemasok Berbasis SDG Kualitas 4. Nilai Kinerja Anggaran SDNP Jember	4			
	Jurnal Kinerja Kinerja yang dapat dilihat oleh publik			Juduli	8	1. Sistem Kinerja Tahun 2024 Terpadu	4			
ii. Pembelian Rework and Penjualan		1.50						1.50	100.00%	
	Dasar Capaian/Monitoring Pembelian Kinerja telah dijadikan dasar untuk pembelian rework and penjumlahan lagi organisasi?		a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) tercapaian lengkap dalam pembelian rework and penjumlahan b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50%) Perjanjian Kinerja tercapaian lengkap dalam pembelian rework and penjumlahan c. Sebagian kecil Capaian Kinerja kurang dari 50% Perjanjian Kinerja tercapaian lengkap dalam pembelian rework and penjumlahan d. Capaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) belum menjadi unsur dalam pembelian rework and penjumlahan	A/B/C/D	8	Penerapan kinerja telah dijadikan dasar pembelian Rework dan Penjumlahan 1. Kumpulan Kapasitas Dasar Kebijakan Pembelian Rework Penjualan SDN 2. Kumpulan Kapasitas Dasar Pembelian Rework Penjualan dan Pengembangan Program Pelayanan Publik 2023, 2024, 2025 3. Capaian SMD B.R. 2023 - 2024 - 2025	A	1.50	https://sdn.pusat.com/jenis/bidder/114761-100001/kapasitas-dar-smd-b.r.2023-2024-2025	
iii. Berangka Logis Kinerja		1.50						1.50	100.00%	
	Apakah terdapat perencanaan kinerja berangka logis kinerja yang meliputi pada kinerja utama organisasi dan diukur dalam perencanaan kinerja seluruh pegawai?		a. terdapat Berangka Logis kinerja yang meliputi pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam perencanaan kinerja seluruh pegawai b. terdapat Berangka Logis kinerja yang meliputi pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam perencanaan kinerja seluruh pegawai c. Berangka Logis kinerja ada namun belum diterapkan pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam perencanaan kinerja seluruh pegawai d. Berangka Logis kinerja belum ada	A/B/C/D	8	Terdapat Berangka Logis kinerja yang meliputi pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam perencanaan kinerja seluruh pegawai 1. Kinerja Kinerja SDNP kemudian 2. Perbaikan Kinerja 2023, 2024 - 2025 3. Matrik Plan Road 2023 - 2024 - 2025 4. SMD Sampel 2023, 2024	A	1.50	https://jurnal.unesa.ac.id/index.php/SJPA/article/view/52811/46211004	
B. PENGUATAN PERGAWASAN		7.50						7.50	100.00%	
1. Mekanisme Pengendalian		2.50						2.50	100.00%	

			Penilaian	Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan	Jumlah	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan
			1. Terjadi peningkatan pelaksanaan pengendalian aktivitas secara berkesinambungan		a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang terencana mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh pemangku jawab aktivitas serta pilgswas unit kerja dan telah terlampaui pada pencapaian kinerja unit kerja b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang terencana mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh pemangku jawab aktivitas serta pilgswas unit kerja namun belum terlampaui pada pencapaian kinerja unit kerja c. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang terencana mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh pemangku jawab aktivitas d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak terencana e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi	A/B/C/D/E	4	1. Dokumen Pengendalian Berjenjang 2. Keputusan Tim Satuan Pengendalian (SPK) 3. Laporan RPT Triwulan I s.d. IV 2023, 2024, 2025 4. RKI RPI 2024, 2024, 2025 5. MRP 2023, 2024, 2025 6. Laporan IMI NIBS 2023, 2024, 2025 7. Laporan IMI FPMO 2023, 2024, 2025	A	100		https://www.gandi.com/docs/848941/cv-afid-pbb/bk-tj-jakarta-widyadot
			b. Peningkatan Pengadaan Masyarakat	3.00		%				3.00	100.00%	
			c. Persentase pencapaian pengadaan masyarakat		Pengadaan ini merupakan realisasi pembangunan, pengadaan infrastruktur yang harus dilaksanakan	%	100.00%	1. Laporan TL Minus Pengadaan Masyarakat Triwulan I Tahun 2023, 2024, 2025 2. Laporan TL Minus Pengadaan Masyarakat Triwulan II Tahun 2023, 2024, 2025 3. Laporan TL Minus Pengadaan Masyarakat Triwulan III Tahun 2023, 2024, 2025 4. Laporan TL Minus Pengadaan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023, 2024	100.00%	1.00		https://www.gandi.com/docs/848941/cv-afid-pbb/bk-tj-jakarta-widyadot
			- Jumlah pengadaan masyarakat yang terus ditingkatkan			Jumlah	5		E			
			- Jumlah pengadaan masyarakat yang sedang dijanjikan			Jumlah	11		F			
			- Jumlah pengadaan masyarakat yang resmi ditandatangani			Jumlah	5		G			

[illegible]

[illegible]

Penilaian			Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan	Jawaban	Catatan / Keterangan / Penjelasan	Jawaban	Nilai	%	Catatan / Keterangan / Penjelasan
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA			17,50						16,06	91,78%	
		Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Burevis	17,50	Sebaik (dengan Nilai Hasil Survei) Dapatmnd Kualitas Pelayanan (Indikator Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / BPP)	Sebaik (20,4)	3,67	Lampiran Survey BPP dan BPPU 2023, 2024	3,67	16,06		https://cibinong.google.com/maps/@11,53,12,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000
TOTAL HASIL									37,53		
NILAI HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS									90,53		